

No. Surat : GPID-033/S&E/VII/2025  
Perihal : Desakan Pernyataan Sikap Keadilan Fiskal bagi Keadilan Iklim  
Lampiran : -

Jakarta, 31 Juli 2025

Kepada Yth,  
**Ibu Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D.**  
**Menteri Keuangan Republik Indonesia**  
Di Tempat

### **Peluang Internasional untuk Meminta Pertanggungjawaban Pencemar dan Orang Super Kaya untuk Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan**

Perkenalkan Kami, yang bertandatangan di bawah ini adalah Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian atau Greenpeace Indonesia, merupakan lembaga yang mempromosikan perlindungan dan konservasi alam berkelanjutan dengan tujuan pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan hak asasi manusia.

Kami menulis surat ini untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar menunjukkan dukungannya terhadap pengenaan pajak yang lebih besar terhadap perusahaan minyak, gas, batubara, smelter-smelter nikel, dan berbagai industri ekstraktif lainnya yang berdampak pada pencemaran lingkungan, serta mendesak orang-orang superkaya untuk mendukung pendanaan iklim dan pembangunan berkelanjutan dalam beberapa forum internasional di masa mendatang.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sejak satu dekade yang lalu, Pemerintah dan Para Pemimpin di berbagai belahan dunia sedang terus berusaha untuk mengakhiri kemiskinan global, mengatasi krisis iklim, dan mewujudkan sejumlah pembangunan berkelanjutan lainnya. Sementara, diperkirakan dampak kerusakan iklim pada industri pertanian, infrastruktur, produktivitas dan kesehatan dapat menyebabkan kerugian sebesar 38 triliun US Dollar per-tahun dari ekonomi global pada tahun 2050.<sup>1</sup> Kerugian dan kerusakan iklim di negara-negara berpendapatan rendah atau negara berkembang diperkirakan mencapai lebih dari USD 300 Miliar per-tahun.<sup>2</sup>

Permasalahannya tentu bukanlah kekurangan uang. Sejak tahun 2015, kekayaan 1% orang terkaya telah melonjak hingga lebih dari USD 33,9 triliun, 22 kali lipat dari

<sup>1</sup>[https://www.reuters.com/business/environment/climate-change-damage-could-cost-38-trillion-per-year-by-2050-study-finds-2024-04-17/#:~:text=BERLIN%2C%20April%2017%20\(Reuters\).activity%20emits%20more%20greenhouse%20gases.](https://www.reuters.com/business/environment/climate-change-damage-could-cost-38-trillion-per-year-by-2050-study-finds-2024-04-17/#:~:text=BERLIN%2C%20April%2017%20(Reuters).activity%20emits%20more%20greenhouse%20gases.)

<sup>2</sup><https://us.boell.org/en/unpacking-finance-loss-and-damage>

GREENPEACE

Greenpeace Indonesia

Jl. HOS. Cokroaminoto  
No. 19 RT 1/ RW 1  
Gondangdia  
Kecamatan Menteng  
Jakarta Pusat 10350

angka yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan tahunan.<sup>3</sup> Mereka terus mengembangkan kekayaan mereka tanpa membayar pajak. Lima perusahaan minyak dan gas saja (ExxonMobil, Chevron, Shell, BP dan Total Energies) melaporkan laba kumulatif sebesar lebih dari USD 100 Miliar pada tahun 2024, dengan perusahaan-perusahaan tersebut memberikan lebih banyak keuntungan kepada para pemegang saham daripada sebelumnya.

Di Indonesia kebijakan fiskal progresif yang lebih adil belum diterapkan. Kebijakan fiskal seharusnya difokuskan pada peningkatan penerimaan dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar.<sup>4</sup> Pemerintah juga dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap penghindaran pajak oleh korporasi dan individu-individu super kaya, memperbaiki sistem pelaporan keuangan lintas negara, serta menutup celah penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dan *profit shifting*. Selain itu, penerapan pajak kekayaan (*wealth tax*) dapat menjadi pilihan untuk memperluas basis pajak secara progresif dan adil.<sup>5</sup> Hal ini belum termasuk pajak progresif lain yang bisa digali Pemerintah seperti *windfall tax* dari minyak, gas dan batubara, pajak digital, pajak karbon, dan lain sebagainya.

Sudah sangat jelas bahwa membuat perusahaan-perusahaan perusak lingkungan dan orang super kaya membayar pajak lebih besar, merupakan langkah yang perlu segera dilakukan untuk memperbesar kapasitas fiskal pemerintah bagi pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan pemulihan lingkungan akibat krisis iklim.

Berikut adalah beberapa agenda yang penting secara politik dan menarik perhatian publik secara luas :

- Presidensi G-20 yang dipimpin oleh Brazil sejak 2024 menyoroti konsep nilai pajak kekayaan minimum global sebagai bagian dari agenda untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memobilisasi sumberdaya untuk pembangunan berkelanjutan;
- Sekretaris Jenderal PBB mendukung “Pajak Solidaritas” untuk kegiatan pelayaran dan ekstraksi bahan bakar fosil, dengan tujuan mengumpulkan dana publik global yang lebih besar untuk pendanaan iklim internasional<sup>6</sup>;
- Sebuah survei yang baru-baru ini dilakukan oleh Greenpeace dan Oxfam di 13 Negara, menemukan bahwa<sup>7</sup> :
  - 86% orang mendukung penyaluran pendapatan dari pajak yang lebih tinggi terhadap perusahaan minyak dan gas bumi, kepada masyarakat yang paling terdampak krisis iklim.

<sup>3</sup><https://www.oxfam.org.uk/media/press-releases/new-wealth-of-top-1-surges-by-over-339-trillion-since-2015-enough-to-end-poverty-22-times-over-oxfam/#:~:text=The%20world's%20richest%20one%20per.per%20cent%20of%20global%20GDP>

<sup>4</sup> Saez, E., & Zucman, G. (2019). Progressive wealth taxation. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2019(2), 437-533.

<sup>5</sup> Isabel Ortiz dan Matthew Cummins, *End Austerity: A Global Report on Budget Cuts and Harmful Social Reforms in 2022–25*

<sup>6</sup><https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2024-11-13/secretary-generals-remarks-high-ambition-coalition-cop29-meeting>

<sup>7</sup><https://www.greenpeace.org/international/press-release/75582/global-survey-finds-8-out-of-10-people-support-taxing-oil-and-gas-corporations-to-pay-for-climate-damages/>

- 90% masyarakat mendukung peningkatan tarif pajak bagi orang super kaya, untuk memperbesar anggaran negara dalam membantu masyarakat paling terdampak bencana iklim.

Terkait dengan berbagai agenda penting di atas, kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan sikap dan kepemimpinannya dalam forum-forum internasional berikut ini, untuk mendorong aksi global yang nyata :

- 1) **Dalam berbagai negosiasi formal atau pembicaraan bilateral mengenai Peta Jalan UNFCCC Baku ke Belem menuju USD 1,3 Triliun**, mohon untuk mengangkat pentingnya Prinsip Pencemar Membayar / Polluter Pays Principle, dan pajak lingkungan yang progresif untuk mendukung peningkatan kapasitas fiskal pemerintah secara inovatif;
- 2) **Dalam negosiasi Konvensi Pajak PBB, Agustus – November 2025**, mohon menyampaikan dukungan dengan :
  - Menambahkan sub-komitmen dibawah komitmen pajak dan pembangunan berkelanjutan mengenai pajak lingkungan yang progresif sesuai dengan Prinsip Pencemar Membayar, yang terdiri dari tanggung jawab perusahaan-perusahaan pencemar dan orang-orang berpenghasilan sangat tinggi;
  - Memperkenalkan mekanisme khusus pada Konvensi terkait, dalam bentuk pajak yang dibayarkan oleh pencemar atas keuntungan global perusahaan multinasional dari industri minyak, gas dan batu bara, serta perusahaan multinasional dari industri pencemar lainnya, kemudian penerimaan pajaknya disalurkan bagi kewajiban pembiayaan iklim global dan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan perjanjian PBB serta mekanisme yang sudah ada;
  - Berkomitmen untuk menerapkan pajak yang efektif terhadap individu-individu yang memiliki kekayaan besar – dengan tarif yang semakin tinggi untuk para triliuner dan mereka yang termasuk dalam kelompok pencemar terburuk atau *super polluters* – serta menegaskan pertanggungjawaban iklim dan utang ekologi mereka, dengan penerimaan pajaknya disalurkan untuk aksi-aksi penanganan krisis iklim dan pembangunan berkelanjutan;
- 3) **Dalam KTT G20 yang dipimpin oleh Afrika Selatan tahun ini**, mohon menyampaikan dukungan untuk menetapkan Pajak Kekayaan Minimum Global, yang akan diimplementasikan melalui Konvensi Pajak PBB. Hal ini akan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa individu-individu yang memiliki kekayaan yang sangat besar memiliki kontribusi yang adil untuk aksi-aksi penanganan krisis iklim dan pembangunan berkelanjutan.
- 4) **Menggunakan Satuan Tugas Pemungutan Pajak Solidaritas Global<sup>8</sup> dan koalisi baru untuk memajaki orang super kaya<sup>9</sup>** sebagai sarana untuk mendorong perjanjian internasional yang lebih kuat guna memajaki perusahaan minyak, gas, dan batu bara multinasional sebagai sumber pencemar, maupun

<sup>8</sup> <https://solidaritylevies.org/>

<sup>9</sup> <https://www.oxfam.org/en/press-releases/oxfam-reaction-spain-brazil-and-south-africa-launching-new-coalition-tax-super-rich>

individu-individu dengan kekayaan sangat besar, dalam rangka membantu membiayai aksi-aksi penanganan krisis iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Kami berharap Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah nyata untuk mendukung kesepakatan internasional yang akan memastikan perusahaan-perusahaan pencemar dan orang-orang super kaya membayar lebih besar atas dampak krisis iklim dan untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan, melalui sikap Indonesia pada pertemuan-pertemuan internasional terkait dalam beberapa bulan mendatang. Kami akan sangat senang jika ada kesempatan untuk berdiskusi secara langsung untuk membicarakan peluang fiskal dan diplomatik yang ada secara lebih mendalam.

Hormat kami,

**Leonard Simanjuntak**  
Greenpeace Indonesia

*Tembusan*

- 1) *Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia*  
2) *Menteri Kehutanan Republik Indonesia*  
3) *Menteri Luar Negeri Republik Indonesia*

GREENPEACE

Greenpeace Indonesia

Jl. HOS. Cokroaminoto  
No. 19 RT 1/ RW 1  
Gondangdia  
Kecamatan Menteng  
Jakarta Pusat 10350